



**ANALISIS KOMPARASI KUALITAS *INTERNET FINANCIAL LOCAL*  
*GOVERNMENT REPORTING* PADA *WEBSITE* RESMI  
KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR  
(Studi Empiris Pada *Website* Resmi Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) pada Jurusan Akuntansi dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**MITA ANANDAYU**

**NIM 080810301008**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**



**ANALISIS KOMPARASI KUALITAS *INTERNET FINANCIAL LOCAL*  
*GOVERNMENT REPORTING* PADA *WEBSITE* RESMI  
KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR  
(Studi Empiris Pada *Website* Resmi Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) pada Jurusan Akuntansi dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**MITA ANANDAYU**

**NIM 080810301008**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terima kasihku kepada:

1. Ibuku Mamiek Ambar Mrantasi dan Bapakku Mochammad Taufiq tercinta;
2. Adikku Mita Adindayu tersayang;
3. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

## MOTTO

Setiap ilmu selalu ada permulaanya, tetapi sama sekali tidak ada pengakhirannya. Kita harus menyadari dan mengakui bahwa apa yang kita ketahui dari ilmu-ilmu jauh lebih sedikit daripada yang tidak kita ketahui.

**(Ulama)**

Yang paling penting untuk kamu ingat pada saat memulai adalah jangan pernah membiarkan orang lain yang tak percaya dengan kemampuanmu meremehkan impian-impianmu. Dunia ini penuh sesak dengan orang-orang yang berpandangan negatif. Mereka punya seribu satu alasan kenapa impianmu tak akan berhasil, tetapi mereka juga siap bergabung denganmu jika kamu berhasil. Karena itu, tetaplah yakin dengan kemampuanmu, dan ubahlah impianmu menjadi kenyataan.

**(Barbara Grogan)**

Jika kau berada dalam titik terendah dalam hidupmu, tidak ada waktu untuk penyesalan, teruslah maju dan ingatlah kepada Allah. Bahwa sesungguhnya hanya kamulah yang dapat menolong dirimu dan ingatlah, Allah selalu bersamamu.

**(Mita Anandayu)**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mita Anandayu

Nim : 080810301008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Komparasi *Internet Financial Local Government Reporting* Pada *Website* Kabupaten dan Kota di Jawa Timur (Studi Empiris Pada *Website* Resmi Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juni 2015

Yang menyatakan,

Mita Anandayu

Nim.080810301008

**SKRIPSI**

**ANALISIS KOMPARASI *INTERNET FINANCIAL LOCAL GOVERNMENT*  
*REPORTING* PADA *WEBSITE* RESMI  
KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR  
(Studi Empiris Pada *Website* Resmi Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)**

Oleh  
MITA ANANDAYU  
080810301008

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Drs. Djoko Supatmoko, M.M, Ak.

Dosen Pembimbing II : Dr. Yosefa Sayekti, M. Com, Ak.

**Mita Anandayu**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perbedaan kualitas laporan keuangan daerah di Jawa Timur yang diunggah melalui *website* resmi masing-masing daerah menggunakan indeks aksesibilitas yang dikembangkan oleh Cheng et al. serta aktif atau tidak aktifnya *website* resmi di setiap daerah. Penilaiannya menggunakan empat komponen indeks aksesibilitas yaitu isi, ketepatan waktu, pemanfaatan teknologi dan *user support*. Pengumpulan data menggunakan data sekunder melalui observasi. Populasi data meliputi seluruh wilayah di Jawa Timur yang terbagi menjadi dua sampel yaitu kabupaten dan kota. Analisis data menggunakan *Mann Whitney Test*. Hasil observasi menunjukkan pemerintah kota dan kabupaten memiliki *e-government* dan dalam status online. 19 Kabupaten dan 9 Kota menerapkan *Internet Financial Local Government Reporting* dan sisanya 10 Kabupaten tidak menerapkan *Internet Financial Local Government Reporting*. Hasil pengujian menunjukkan tidak ada perbedaan atas komponen isi/konten, ketepatan waktu, pemanfaatan teknologi dan *user support* yang mencolok dalam mengungkapkan laporan keuangan maupun non keuangan antara Pemerintah kota dan Kabupaten di Jawa Timur.

Kata kunci: *e-government, internet financial local government reporting, indeks aksesibilitas, konten, ketepatan waktu, pemanfaatan teknologi, user support.*

## RINGKASAN

**Analisis Komparasi *Internet Financial Local Government Reporting* Pada Website Resmi Kabupaten dan Kota di Jawa Timur (*Studi Empiris Pada Website Resmi Kabupaten dan Kota di Jawa Timur*);** Mita Anandayu, 080810301008; 2015: 66 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa paradigma baru dalam tatanan seluruh aktivitas kehidupan baik pemerintah, dunia usaha, pendidikan dan masyarakat lainnya. Hal ini merupakan konsekuensi perkembangan budaya masyarakat modern, yang pada akhirnya harus diakui bahwa teknologi telah merubah tata kehidupan manusia khususnya teknologi informasi yang banyak menjanjikan kemudahan dan fasilitas (Suryani, 2009). Melalui media ini, berbagai macam informasi yang dibutuhkan hampir semua bisa didapat. Dunia internet atau yang sering dikenal dengan istilah *cyberspace* yang tidak mengenal batas waktu dan wilayah.

Tren penggunaan internet sebagai media pengungkapan informasi juga berdampak pada sektor pemerintah. Salah satu upaya pemerintah dalam hal tren penggunaan internet sebagai media pengungkapan informasi yaitu dengan menerapkan sistem *electronic government (e-government)* atau pemerintahan berbasis elektronik. Sistem ini dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good government*). Pemerintahan tradisional (*traditional government*) yang identik dengan *paper-based administration* mulai ditinggalkan (Instruksi Presiden No 6 Tahun 2001 dan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003).

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Semakin besarnya tuntunan terhadap

pelaksanaan akuntabilitas sektor publik juga akan memperbesar kebutuhan atas transparansi informasi keuangan sektor publik (Nordiawan, 2006).

Adapun Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 Pasal 3 menyebutkan bahwa informasi keuangan daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan dan dapat diperhitungkan. Sedangkan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 Pasal 12 menyebutkan salah satu tujuan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah adalah menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat dengan maksud masyarakat ikut berperan aktif melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan.

Begitupun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, disebutkan, informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis, yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Secara keseluruhan, *e-government* menunjukkan bahwa akuntabilitas antara pemerintah daerah dan warga negara dapat ditingkatkan tidak hanya melalui penggunaan yang lebih baik dari laporan tahunan, tetapi juga dengan meningkatkan keterlibatan publik dalam pelayanan publik dan melibatkan publik secara *real-time* melalui interaksi dengan pemerintahan dan proses demokrasi. Bukti empiris diperlukan untuk menggambarkan perkembangan peran pemerintah dalam akuntabilitas dan mengurangi korupsi (Do, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktif atau tidaknya e-government, memeriksa tersedianya *Internet Financial Local Government* dan menganalisis perbedaan kualitas e-government menurut indeks aksesibilitas pada website resmi pemerintah daerah di Jawa Timur. Penelitian ini dihipotesiskan adanya perbedaan kualitas pengungkapan laporan keuangan antara pemerintah kabupaten dan kota dikarenakan pemerintah kota lebih disorot dibandingkan kabupaten.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perbedaan kualitas laporan keuangan daerah di Jawa Timur yang diunggah melalui *website* resmi masing-masing daerah menggunakan indeks aksesibilitas yang dikembangkan oleh

Cheng et al. serta aktif atau tidak aktifnya *website* resmi disetiap daerah. Penilaiannya menggunakan empat komponen indeks aksesibilitas yaitu isi, ketepatan waktu, pemanfaatan teknologi dan *user support*. Pengumpulan data menggunakan data sekunder melalui observasi. Populasi data meliputi seluruh wilayah di Jawa Timur yang terbagi menjadi dua sampel yaitu kabupaten dan kota.

Hasil observasi menunjukkan 100% Pemerintah kota dan Kabupaten memiliki *e-government* dan dalam status online. Namun, dari hasil observasi tersebut juga didapat Pemerintah kota dan Kabupaten yang memiliki website tetapi tidak update yaitu 12 Kabupaten antara lain Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Sumenep. Sedangkan 3 Kota yang tidak update untuk *Internet Financial Local Government Reporting* adalah Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo.

Hasil observasi menunjukkan 19 Kabupaten dan 9 Kota menerapkan *Internet Financial Local Government Reporting* dan sisanya 10 Kabupaten tidak menerapkan laporan keuangan pemerintah daerah pada internet antara lain, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Sidoarjo.

Tidak ada perbedaan atas komponen isi/konten, ketepatan waktu, pemanfaatan teknologi dan *user support* yang mencolok jika dalam mengungkapkan laporan keuangan maupun non keuangan antara Pemerintah kota dan Kabupaten di Jawa Timur. Sehingga memiliki arti  $H_0$  atau hipotesis dalam penelitian ini ditolak.

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KOMPARASI *INTERNET FINANCIAL LOCAL GOVERNMENT REPORTING* PADA *WEBSITE RESMI KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR (Studi Empiris Pada Website Resmi Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*“** telah disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan, nasihat, serta saran maupun kritik dari semua pihak baik itu dari keluarga, desn pembimbing, serta pihak-pihak lainnya. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr.H.M. Fathorrozi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
2. Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Dr. Ahmad Roziq, S.E., MM., Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember
3. Drs. Djoko Supatmoko, M.M, Ak. dan Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak. , selaku dosen pembimbing yang dengan ketulusan hati dan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak. selaku Dosen Wali selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
5. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
6. Ibuku Mamiiek Ambar Mrantasi dan Bapakku Mochammad Taufiq tersayang atas limpahan doa, semangat, serta motivasi positif yang diberikan.
7. Adikku ternyempluk Kemkema Krebsi Mita Adindayu, terima kasih atas dukungannya selama ini.

8. Sahabat-sahabatku Laras Ayu, Habibi Imron, Yasin Abdullah, Rizky Handrianto, dan Fifi Mustika atas segala dukungan dan motivasinya selama ini.
9. Sahabat-sahabatku SMA Anselia, Cita, Yulan, Ghea, Primanda, Angan, Hery, Angga, Tink, Agung, Timur, Toyib, dan Fendy. Setiap pertanyaan kalian tentang skripsi adalah semangatku.
10. Teman-teman Akuntansi 2008 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu atas dukungan dan motivasi positif yang diberikan.
11. Teman-teman penyiar Soka Radio atas dukungan dan pengertiannya selama ini.
12. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu penulis mengungkapkan terima kasih banyak atas semua bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mohon kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dijadikan acuan untuk pengembangan penulisan berikutnya.

Jember, 24 Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB 2. LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) dan Teori Pensinyalan ( <i>Signalling Theory</i> ) dalam Pemerintahan .....	8
2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	9
2.3 <i>Internet Financial Local Government Reporting</i> .....	12
2.4 Penelitian Terdahulu.....	15
2.5 Kerangka Pemikiran .....	18
2.6 Pengembangan Hipotesis .....	20
<b>BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	26

3.2	Sumber Data .....	26
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian .....	27
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	28
3.5	Metode Analisis Data .....	29
3.6	Operasionalisasi Variabel .....	31
3.7	Uji Hipotesis .....	32
3.8	Tahapan Penelitian .....	33
<b>BAB 4.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
4.1	Deskripsi Data .....	34
4.2	Hasil Analisis Data .....	36
4.2.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	36
4.2.2	Uji Hipotesis .....	38
4.3	Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis .....	42
4.3.1	Hipotesis .....	42
<b>BAB 5.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
5.1	Kesimpulan .....	44
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	46
5.3	Saran .....	46
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>

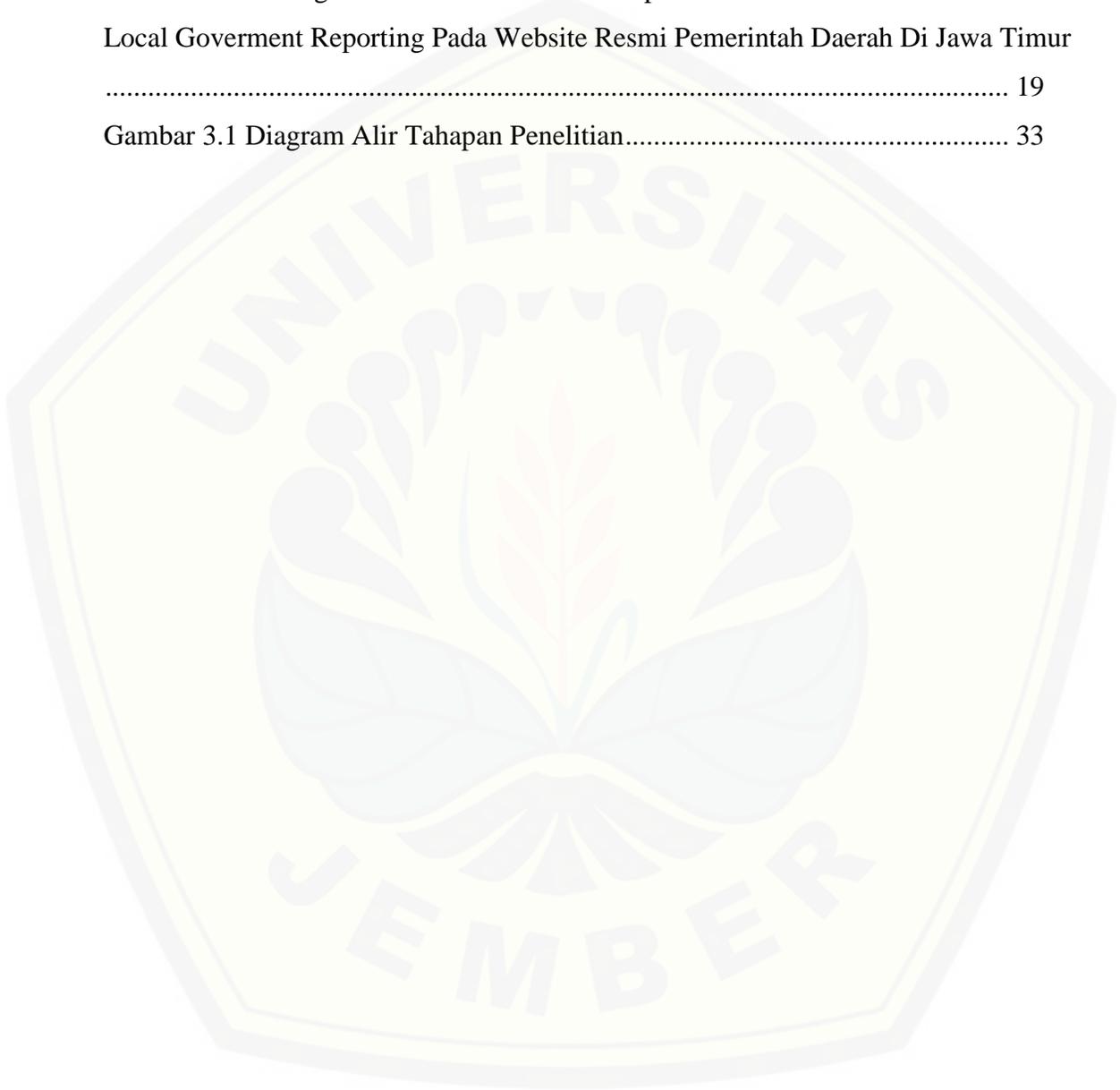
**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 3.1 Indeks Aksesibilitas .....	22
Tabel 4.1 Rekapitulasi Objek Penelitian .....	35
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif .....	36
Tabel 4.3 Hasil Uji Mann Whitney Untuk Komponen Isi/Konten .....	38
Tabel 4.4 Hasil Uji Mann Whitney Untuk Komponen Ketepatan Waktu (Timeliness) .....	39
Tabel 4.5 Hasil Uji Mann Whitney Untuk Komponen Teknologi (Technology) .....	40
Tabel 4.6 Hasil Uji Mann Whitney Untuk Komponen User Support .....	41
Tabel 4.7 Hasil Uji Mann Whitney Untuk Keempat Komponen Dalam Indeks Aksesibilitas .....	42

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Analisis Komparasi Kualitas Internet Financial  
Local Government Reporting Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Di Jawa Timur  
..... 19

Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian..... 33



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa paradigma baru dalam tatanan seluruh aktivitas kehidupan baik pemerintah, dunia usaha, pendidikan dan masyarakat lainnya. Hal ini merupakan konsekuensi perkembangan budaya masyarakat modern, yang pada akhirnya harus diakui bahwa teknologi telah merubah tata kehidupan manusia khususnya teknologi informasi yang banyak menjanjikan kemudahan dan fasilitas (Suryani, 2009). Melalui media ini, berbagai macam informasi yang dibutuhkan hampir semua bisa didapat. Dunia internet atau yang sering dikenal dengan istilah *cyberspace* yang tidak mengenal batas waktu dan wilayah.

Tren penggunaan internet sebagai media pengungkapan informasi juga berdampak pada sektor pemerintah. Salah satu upaya pemerintah dalam hal tren penggunaan internet sebagai media pengungkapan informasi yaitu dengan menerapkan sistem *electronic government (e-government)* atau pemerintahan berbasis elektronik. Sistem ini dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good government*). Pemerintahan tradisional (*traditional government*) yang identik dengan *paper-based administration* mulai ditinggalkan (Instruksi Presiden No 6 Tahun 2001 dan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003).

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Semakin besarnya tuntunan terhadap

pelaksanaan akuntabilitas sektor publik juga akan memperbesar kebutuhan atas transparansi informasi keuangan sektor publik (Nordiawan, 2006).

Adapun Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 Pasal 3 menyebutkan bahwa informasi keuangan daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan dan dapat diperhitungkan. Sedangkan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 Pasal 12 menyebutkan salah satu tujuan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah adalah menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat dengan maksud masyarakat ikut berperan aktif melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan.

Begitupun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, disebutkan, informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis, yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Indonesia terdiri dari 34 provinsi, Provinsi dibagi menjadi 403 kabupaten dan 98 kota (<http://www.jatimprov.go.id/>). Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Bab I Pasal 3 menyebutkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 adalah poin a yaitu Pemerintah daerah Provinsi yang terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Kemudian poin b, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125). Dari 34 provinsi, provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota yang menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Jawa Timur memiliki wilayah terluas diantara 6 provinsi di Pulau Jawa dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur dikenal sebagai pusat kawasan timur Indonesia dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi yakni berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto nasional (<http://www.jatimprov.go.id/>).

Menurut Laporan Survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia oleh *Transparency International* Indonesia, rata-rata indeks korupsi di tingkat kota pada tahun 2006 mencapai angka 4,72, sedangkan pada tahun 2010 mencapai angka 4,93. Terjadi peningkatan sebesar 0,20 antara tahun 2006 hingga 2010. Akibatnya adalah munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan (<http://www.index.ti.or.id/>). Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2012) menunjukkan bahwa rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan pada tahun 2012 terbukti lebih rendah daripada rata-rata indeks non keuangan. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak pemerintah kota (kabupaten) masih kurang optimal dalam mengembangkan pelaporan keuangan melalui *website*-nya. (Rahman et al., 2013).

Dalam beberapa jurnal asing yang peneliti temukan, beberapa diantaranya hasil survey yang dilakukan oleh Pring, Ng dan Dolley (1999) menemukan bahwa 15% dari pengguna internet tidak tertarik dengan adanya laporan keuangan bahkan setengahnya tidak membacanya sama sekali karena kurangnya transparansi laporan keuangan kepada publik (Likierman, 1992). Baik itu laporan keuangan maupun non keuangan adalah komponen yang tepat untuk keterbukaan akuntabilitas kepada publik (Barton, 2006; Boyne dan Law, 1991; Coy et al., 2001). Noordhoek dan Saner (2005) berasumsi bahwa ada hubungan antara transparansi laporan keuangan maupun non keuangan, anti korupsi dan akuntabilitas. *Website* pemerintah karena adanya kecanggihan teknologi dapat menjadi media bagi pemerintah dan publik untuk mengurangi jarak antara pemerintah dan publik sebagai pelebaran akibat dari 'manajerialisme' ditahun 90-an. Pada penelitian Florini (2000) dan Moon (2002) memberikan hasil bahwa banyak *website* pemerintah yang mencakup fitur interaktif dan jasa dalam rangka untuk memulihkan kepercayaan kepada publik dengan memberikan informasi dan peraturan yang diperlukan dan menanggapi pertanyaan individu dengan cara yang lebih efektif dan tepat waktu. Keterbukaan dan berbagi informasi tersebut akan memungkinkan publik untuk membuat keputusan politik yang lebih tepat dan pada saatnya tentu akan mengembangkan akuntabilitas

pemerintah (Vishwanath dan Kaufmann, 1999). Bertot et al. (2010) juga berargumen kegunaan *e-government* dan sosial media dapat membuat perubahan positif yang signifikan dalam sikap sosial terhadap transparansi. Publik menantikan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan transparansi dan memberdayakan publik untuk memonitor kinerja pemerintah secara dekat (Demchak, Fris dan La Porte, 2000; Pina et al., 2007a, 2007b). Pina et al. (2007b) menemukan bahwa internet menawarkan potensi yang signifikan untuk membawa publik lebih dekat dengan pemerintah. Kegunaan internet sebagai sarana penyebaran informasi membantu untuk meningkatkan akuntabilitas dengan meningkatkan transparansi dan mengurangi biaya penyebaran informasi kepada publik (Pina et al., 2007a).

Verawaty (2014) pernah meneliti optimalisasi pelaporan keuangan dengan berfokus pada keunggulan penyebaran informasi laporan keuangan dengan pendekatan media internet dengan membandingkan kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau *Interenet Financial Reporting* pemerintah provinsi dan Pemerintah kota/Kabupaten di Indonesia dengan menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000). Dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa tidak ada perbedaan pengungkapan informasi antara pemerintah provinsi yang lebih disorot oleh masyarakat sehingga dihipotesiskan akan mengungkapkan informasi yang dimilikinya dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan Pemerintah kota/Kabupaten.

Secara keseluruhan, *e-government* menunjukkan bahwa akuntabilitas antara pemerintah daerah dan warga negara dapat ditingkatkan tidak hanya melalui penggunaan yang lebih baik dari laporan tahunan, tetapi juga dengan meningkatkan keterlibatan publik dalam pelayanan publik dan melibatkan publik secara *real-time* melalui interaksi dengan pemerintahan dan proses demokrasi. Bukti empiris diperlukan untuk menggambarkan perkembangan peran pemerintah dalam akuntabilitas dan mengurangi korupsi (Do, 2014).

Atas dasar tersebut, penelitian ini akan mengupas tentang optimalisasi pelaporan akuntansi dengan berfokus pada keunggulan diseminasi informasi laporan keuangan dengan pendekatan media internet, antara lain dapat didistribusikan lebih cepat (aspek *timeliness*) dan dapat dieksploitasi untuk lebih membuka diri dengan menginformasikan laporan keuangannya (aspek *disclosure*). Kualitas pengungkapan pelaporan keuangan di sektor publik akan lebih optimal jika pelaporan keuangan menggunakan *Internet Financial Reporting* (IFR) atau yang juga bisa disebut dengan *Internet Financial Local Government Reporting* untuk Pemerintah Daerah. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “ANALISIS KOMPARASI KUALITAS *INTERNET FINANCIAL LOCAL GOVERNMENT REPORTING* PADA *WEBSITE* RESMI KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR (Studi Empiris Pada *Website* Resmi Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan undang-undang, Instruksi Presiden dan Peraturan Pemerintah yang telah diuraikan pada latar belakang maka sudah selayaknya keterbukaan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimasing-masing Pemerintah kota dan Kabupaten di Jawa Timur lebih dioptimalkan. Total Pemerintah kota dan Kabupaten di Jawa Timur yang berjumlah 29 Kabupaten dan 9 Kota, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota telah menerapkan *e-government*?
2. Apakah seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur telah menyediakan *Internet Financial Local Government Reporting* di *website* resmi masing-masing daerah?
3. Apakah ada perbedaan kualitas yang mencolok atas komponen isi/konten, ketepatan waktu, pemanfaatan teknologi dan *user support* antara *website* resmi Kabupaten dan Kota?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memeriksa ada atau tidaknya serta aktif atau tidak aktifnya *website* resmi Pemerintah kota dan Kabupaten di Jawa Timur.
2. Memeriksa tersedia atau tidaknya *Internet Financial Local Government Reporting* pada *website* resmi Pemerintah kota dan Kabupaten di Jawa Timur.
3. Menganalisis perbedaan kualitas atas komponen isi/konten, ketepatan waktu, pemanfaatan teknologi dan *user support* antara Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

### 1.4 Manfaat Penelitian

*Internet Financial Local Government Reporting* merupakan salah satu pengembangan ilmu akuntansi yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu media untuk keterbukaan publik terhadap pelaporan keuangan sektor publik. Pengembangan ini akan mengupas tentang sebagaimana optimalnya pelaporan akuntansi yang memang telah diinstruksikan pemerintah ataupun telah dibuat perundang-undangannya. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini:

1. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi Kepala Daerah ataupun Pejabat Pengelola Informasi Daerah dalam mengoptimalkan *Internet Financial Local Government Reporting* yang tentunya lebih mempermudah dan lebih cepat untuk masyarakat dalam pengaksesan informasi serta lebih efisien untuk Pemerintah Daerah dalam penyampaian informasi.
2. Bagi masyarakat/publik, penelitian ini diharapkan dapat menggugah rasa keingintahuan yang lebih dalam terhadap transparansi laporan keuangan

dikarenakan masyarakat/publik juga memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah sebagai pemonitor kinerja pemerintah. Nantinya pengungkapan laporan keuangan ini sebagai satu media yang mudah untuk memonitor kinerja pemerintah dengan lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat/publik.

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan informasi keuangan dan non keuangan melalui internet yang merupakan pengembangan dari praktek akuntansi.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain, terutama pihak-pihak yang mengambil obyek penelitian yang sama dengan latar belakang dan waktu penelitian yang berbeda. Selain itu penelitian ini juga menambah wawasan peneliti.

## BAB 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*) dan Teori Pensinyalan (*Signalling Theory*) dalam Pemerintahan

Menurut Zimmerman (1977), *agency problem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai prinsipal memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi dapat juga disebut prinsipal karena menggantikan peran rakyat. Namun dapat juga dipandang sebagai agen karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Implikasi dari teori ini adalah prinsipal, yaitu rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan kepada agen, baik pemerintahan maupun para politisi. Politisi sebagai prinsipal juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah.

Hubungan prinsipal dan agen dapat dilihat dalam politik demokrasi (Moe, 1984). Masyarakat adalah prinsipal, politisi (legislatif) adalah agen mereka. Politisi (legislatif) adalah prinsipal, birokrat/pemerintah adalah agen mereka. Pejabat pemerintah adalah prinsipal, pegawai pemerintah adalah agen mereka. Keseluruhan politik tersusun dari alur hubungan prinsipal-agen, dari masyarakat hingga level terendah pemerintahan. Fadzil dan Nyoto (2011) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan prinsipal-agen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah prinsipal dan pemerintah daerah bertindak sebagai agen. Hal ini dikarenakan, Indonesia sebagai negara kesatuan, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilih dan juga kepada pemerintah pusat.

Dalam konteks Teori Pensinyalan, pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada rakyat (Evans dan Patton, 1987). Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan

dapat berjalan dengan baik. Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada rakyat. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik.

APBD menurut UU Keuangan Negara ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda). Peraturan daerah ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Halim dan Abdullah, 2006). Menurut Fadzil dan Nyoto (2011), hubungan keagenan menimbulkan asimetri informasi yang menimbulkan beberapa perilaku seperti oportunistik, kejahatan kedua atau *moral hazard* dimana diartikan sebagai perilaku seseorang yang mengakibatkan resiko dan akibat tindakannya tersebut ditanggung oleh pihak lain, dan *adverse selection* yang memiliki arti masalah yang ditimbulkan oleh informasi asimetris sebelum transaksi terjadi. Perilaku oportunistik dalam proses penganggaran contohnya, (1) anggaran memasukkan program yang berorientasi publik tetapi sebenarnya mengandung kepentingan pemerintah untuk membiayai kebutuhan jangka pendek mereka dan (2) alokasi program ke dalam anggaran yang membuat pemerintah lebih kuat dalam posisi politik terutama menjelang proses pemilihan, yaitu program yang menarik bagi pemilih dan publik dapat berpartisipasi di dalamnya.

Kedua teori ini menjadi dasar bahwa untuk meminimalkan asimetri informasi, pengungkapan akuntansi sektor publik diperlukan. Tentu dengan diseminasi melalui keunggulan internet dengan fasilitas *e-government*, pengungkapan akan lebih memadai dengan keunggulan utama yaitu, dapat didistribusikan lebih cepat (aspek ketepatan waktu) dan dapat dieksploitasi untuk lebih membuka diri dengan menginformasikan laporan keuangannya (aspek pengungkapan) (Verawaty, 2014).

## 2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam

rangka pelaksanaan otonomi daerah. Disebut wajar apabila kemudian pemerintah pusat meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah mengenai bagaimanakah penggunaan sumber daya keuangan tersebut. Salah satu media yang digunakan pemerintah pusat adalah laporan keuangan pemerintah daerah (Rahman et al., 2013).

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah adalah untuk menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan dan sebagai media akuntabilitas sumber daya yang dipercayakan kepada lembaga pemerintah. Jika ditinjau dari sisi rakyat di daerah, laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun dengan baik dapat menjelaskan bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut pasal 32 UU No. 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun berdasarkan sesuai dengan SAP. Melanjutkan pasal 32 UU No. 17 Tahun 2003, PP Nomor 24 Tahun 2005 menyebutkan bahwa laporan keuangan sudah harus sesuai dengan SAP. Sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 unsur laporan keuangan yang harus disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas keuangan di pemerintah dalam rangka untuk memenuhi tujuan umum atas laporan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran (*Budgetary Reports*), yang terdiri dari:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran setidaknya harus memuat unsur pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.



Pada setiap akhir tahun anggaran dan periode pemerintahan kepala daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada DPRD sebagai wakil dari masyarakat yang telah mempercayakan pengelolaan sumber daya daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 184 ayat 1 menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk nyata dari adanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua jenis, yaitu: akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Rahman et al., 2013).

### ***2.3 Internet Financial Local Government Reporting***

Seperti sektor privat, sektor publik pun telah menggunakan internet. Pada semua level dan adopsinya dalam bentuk *e-government* atau juga bisa disebut dengan *Internet Financial Local Government Reporting*, internet berperan signifikan dalam administrasi publik, terutama dalam pelaporan keuangan sektor publik. Melalui *Internet Financial Local Government Reporting*, pegawai pemerintah dapat menyediakan informasi dan melakukan pelayanan kepada *stakeholder* internal yang terdiri atas karyawan, dewan direksi ataupun pemegang saham serta eksternal yang

terdiri atas pemerintah, atau pihak berkepentingan lain seperti halnya masyarakat melalui website (Verawaty, 2014)

Komunikasi berskala besar yang ditawarkan dalam *website* seperti *Internet Financial Local Government Reporting* ini memberikan kesempatan untuk demokrasi *digital* dan akuntabilitas yang lebih transparan bagi penduduk dan *stakeholder* lainnya (Style dan Tennyson, 2007). Pertimbangan bahwa akuntabilitas secara implisit diharapkan ada dalam setiap tujuan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, *e-government* berperan penting dalam demokratisasi informasi kinerja pemerintah dengan menyediakan informasi keuangan yang paling baik dan secara potensial lebih mudah diakses oleh *stakeholder* publik.

Iklim pertumbuhan akuntabilitas memusatkan perhatian pada administrator pemerintah daerah dengan pendekatan sistem informasi. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah daerah di USA telah mengadopsi struktur pemerintahan dengan *city manager* sebagai alat untuk meningkatkan kinerja administratif dengan menunjukan *webmaster* atau yang dalam sektor privat disebut *Chief Information Officer* (CIO) (Giroux dan McLelland, 2003) dan dalam sektor pemerintah disebut dengan *Government Chief Information Officer* (GCIO) (Nugroho dalam Verawaty, 2014). Daerah-daerah yang menggunakan pendekatan administratif ini telah menunjukkan suatu kinerja keuangan yang *superior* (Giroux dan McLelland, 2003) dan tingkatan pengungkapan akuntansi yang lebih luas dibandingkan daerah-daerah lain dengan struktur pemerintahan yang berbeda (Robbins dan Austin, 1986 dan Giroux dan McLelland, 2003 serta Zimmerman, 1997 dan Ingram dan DeJong, 1987 dalam Verawaty, 2014).

Pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pemerintah daerah melalui internet atau yang lebih mudah disebut dengan *Internet Financial Local Government Reporting* merupakan perkembangan dari praktek akuntansi. Pemerintah daerah juga telah menggunakan media internet untuk menyampaikan informasi kepada pengguna. Melalui *website* pemerintah daerah, informasi tersebut akan tersampaikan dengan tepat waktu (Verawaty, 2014).

Venter (2002) dalam Chandra (2008) mengidentifikasi cara penyajian melalui *website* yaitu:

1. Membuat duplikat (menduplikasi) laporan keuangan yang sudah dicetak ke dalam format *electronic paper*.
2. Mengkonversi laporan keuangan ke dalam format HTML.
3. Meningkatkan pencantuman laporan keuangan melalui website sehingga lebih mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan daripada laporan keuangan dalam format cetak.

Fitriana (2009) mengungkapkan bahwa Internet Financial Reporting termasuk Internet Financial Local Government Reporting dinilai memberikan berbagai keuntungan:

1. Menawarkan solusi biaya rendah (bagi kedua belah pihak). Bagi investor dan masyarakat, memberikan kemudahan dalam mengakses informasi perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan/pemerintah dapat mengurangi biaya untuk mencetak serta mengirim informasi perusahaan kepada investor. Menawarkan ketepatan waktu dalam penyebaran serta akses informasi sehingga informasi lebih relevan karena tepat waktu.
2. Sebagai media komunikasi massa untuk laporan perusahaan/pemerintahan. Informasi dapat diakses oleh pengguna yang lebih luas daripada media komunikasi yang lama. Tidak ada batasan wilayah sehingga dapat mengembangkan jumlah investor potensial.
3. Menawarkan informasi keuangan dalam berbagai format yang memudahkan dan bisa diunduh (Hanifa dan Rashid, 2005 dalam Fitriana, 2009). Adobe Acrobat format dalam portable document format (PDF) biasanya merupakan format yang paling umum digunakan (Pervan, 2006). Selain itu format yang digunakan adalah HTML (Hypertext Markup Language), Excel, dan XBLR.
4. Memungkinkan pemakai berinteraksi dengan perusahaan/pemerintahan untuk bertanya atau memesan informasi tertentu dengan cara yang jauh

lebih mudah dan murah dibanding mengirim surat atau telepon ke perusahaan/kantor pemerintahan.

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis penelitian. Terdapat penelitian dari dalam dan luar negeri yang membahas mengenai ketersediaan laporan keuangan melalui media internet atau *Internet Financial Reporting* (IFR) pada sektor publik. Groff dan Pittman (2004) meneliti mengenai praktek IFR pada 100 pemerintah daerah terbesar di USA. Laswad et al (2005) menguji IFR secara sukarela pada pemerintah daerah di New Zealand. Kemudian Styles dan Tennyson (2007) meneliti *accessibility* pelaporan keuangan semua pemerintah daerah USA di internet.

Secara khusus pada penelitian ini peneliti meneliti pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Literatur-literatur IFR yang ada mengindikasikan bahwa sama seperti sektor privat, sektor publik juga menggunakan internet sebagai mekanisme untuk menyebarkan laporan dan pengungkapan yang disediakan bagi stakeholder publik. Hal ini mendukung pernyataan Wagenhofer (2003) dalam Verawaty (2014) bahwa IFR tidak mungkin melepaskan diri dari pengungkapan akuntansi sektor publik. Beberapa diantaranya peneliti paparkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
Verawaty (2010)	Ketersediaan <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) Melalui <i>e-Government</i> Sebagai Sarana Transparansi,	Pemerintah Daerah Sumatera Selatan	Jumlah penduduk berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan.

	Partisipasi, dan Akuntabilitas Publik di Sumatera Selatan		
Verawaty dan Merina (2011)	Aksesibilitas Informasi Publik Pemerintah Provinsi di Indonesia (Telaah Penerapan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)	Pemerintah Provinsi di Indonesia	Jumlah penduduk berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Selain memiliki kekayaan yang lebih besar sehingga diasumsikan akan memberikan kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau <i>Internet Financial Reporting</i> yang lebih baik dibandingkan Pemerintah kota/Kabupaten.
Verawaty (2014)	Analisis Komparasi Indeks Internet Financial Reporting Pemerintah Daerah di	<i>Website</i> Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	78,79% <i>website</i> pemerintah kota dalam status online, sisanya

	Indonesia	di Indonesia	<p>9,09% <i>website</i> yang dimiliki dalam status error dan 12,12% pemerintah kota bahkan belum memiliki <i>website</i>. Artinya, penggunaan <i>website</i> masih sedikit dan tidak terdapat perbedaan antara kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Indonesia</p>
--	-----------	--------------	---

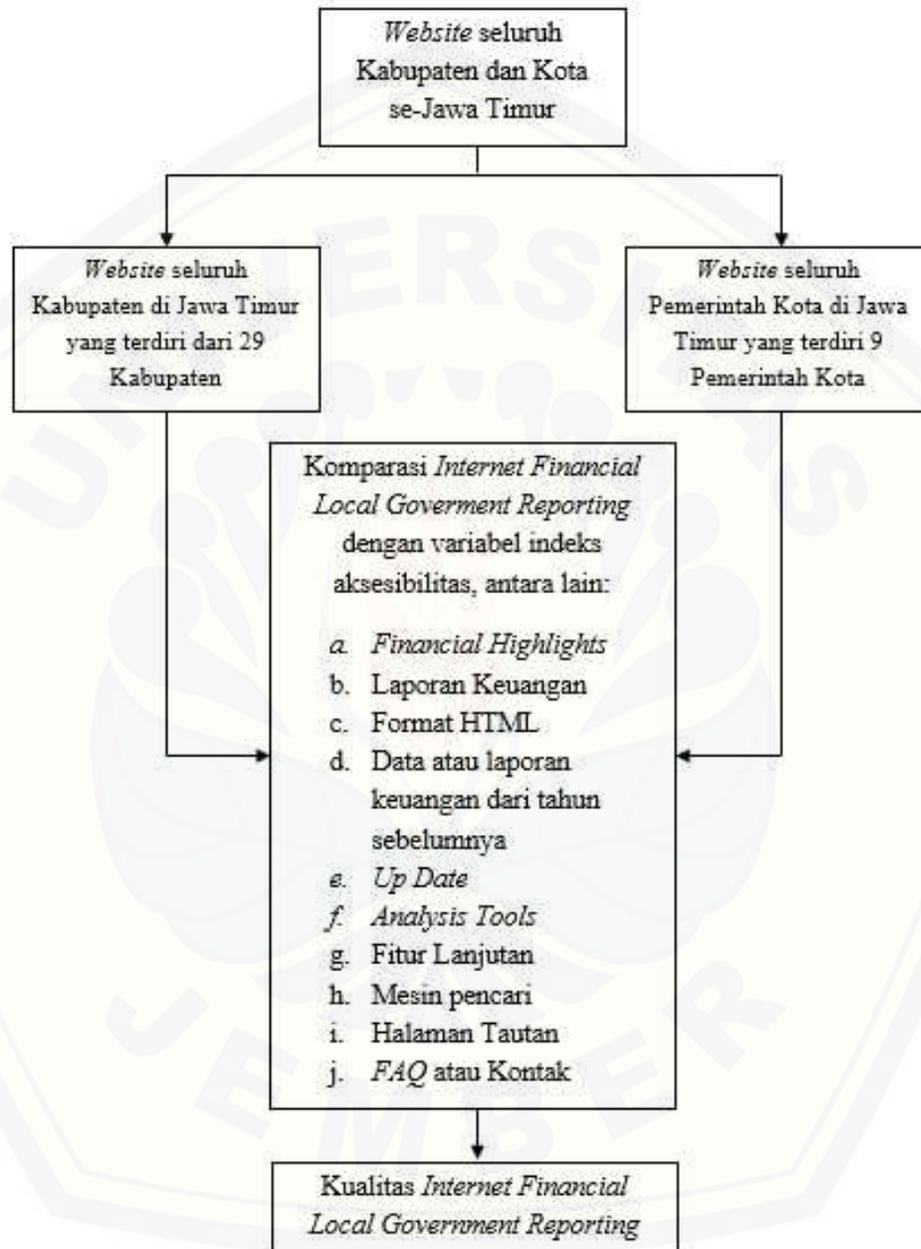
Dari penelitian-penelitian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk berhubungan terhadap signifikansi pengungkapan laporan keuangan. Mengingat bahwa penduduk berhak untuk mengetahui laporan keuangan daerah, maka sudah seharusnya pemerintah daerah melaporkannya. *e-government* yang seharusnya sudah diterapkan dikarenakan teknologi yang semakin canggih yaitu dengan pemanfaatan internet sebagai media publikasi laporan keuangan, justru masih ditemukan status *offline* atau tidak memiliki *website*, status *error* ataupun tidak

*update*. Berarti bahwa penggunaan *website* pada pemerintah daerah sampai dengan September 2013 hasil dari penelitian Verawaty (2014) masih sedikit.

Beda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu objek penelitian. Penelitian ini memilih provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia dengan melihat beberapa hasil penelitian yang sudah ada apakah jumlah penduduk benar adanya berkorelasi dengan keterbukaan laporan keuangan khususnya melalui media internet. Sampel yang digunakan pun ada dua jenis sampel yaitu Pemerintah kota dan Kabupaten, dimana keduanya memiliki ciri yang berbeda yaitu Pemerintah kota yang lebih disorot daripada Kabupaten dikarenakan Pemerintah kota lebih memiliki kekayaan yang lebih besar dibandingkan kabupaten.

## **2.5 Kerangka Pemikiran**

Menurut Muhamad (2009: 75), kerangka pikir adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis. Sedangkan jika mengutip pemikiran Riduwan (2004: 25), kerangka pikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah penelitian. Dapat ditarik kesimpulan kerangka pikir merupakan model dari suatu riset yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk gambar atau skema. Menggambarkan secara spesifik pola pikir hubungan antar variabel-variabel di dalam sebuah penelitian. Kerangka konseptual dimaksudkan untuk memahami bagaimana alur logika berjalannya variabel dalam penelitian. Berdasarkan uraian dari tinjauan teoritis penelitian terdahulu, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Analisis Komparasi Kualitas Internet Financial Local Government Reporting Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Di Jawa Timur

## 2.6 Pengembangan Hipotesis

*Internet Financial Local Government Reporting* merupakan penyajian modern yang dilakukan guna mendukung *good government* dan *e-government* di daerah seluruh Indonesia. Bahwasannya informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis, yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan negara yang baik, maka sudah seharusnya setiap daerah memiliki keterbukaan informasi publik untuk lebih dioptimalkan.

Sesuai dengan Teori Keagenan, masyarakat sebagai *principal* memberikan mandat kepada pemerintah sebagai *agent* untuk memberikan informasi keuangannya dengan tujuan agar masyarakat turut aktif dalam pengawasan pemerintahan. Adapun hubungannya dengan Teori Pensinyalan, laporan keuangan yang diberikan kepada masyarakat ini sebagai dorongan pemerintah untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat karena pemerintah mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (masyarakat dan investor). Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak luar berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek pemerintah daerah yang akan datang. Hunton, et al., 2006 dalam Lai et al., 2009 dijelaskan, pengungkapan informasi keuangan secara transparan akan menyebabkan pihak-pihak yang terkait dapat lebih mudah mencerna dan lebih efektif menggunakan informasi untuk memahami ekonomi pemerintah daerah.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Verawaty (2014) mengenai komparasi indeks *Internet Financial Reporting* antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, dinyatakan tidak terdapat perbedaan antara kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau *Internet Financial Reporting* Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia dengan menggunakan indeks aksesibilitas yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000).

Namun, dalam penelitian ini Pemerintah kota dianggap lebih disorot dibandingkan Kabupaten. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten relatif lebih luas daripada wilayah Pemerintah kota. Oleh karenanya, di wilayah Kabupaten banyak terdapat desa tertinggal, sementara untuk menjangkau pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dibutuhkan anggaran yang lebih besar. Dari aspek perekonomian, rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten lebih rendah daripada PDRB Kota. PDRB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun), sehingga merupakan salah satu indikator perekonomian suatu daerah. Hal ini berimplikasi pada proporsi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Aktivitas ekonomi dan pendapatan (*income*) di kota juga lebih besar daripada kabupaten (Prud'homme, 1995). Oleh karena itu, Pemerintah kota tuntutan transparansi keuangannya juga lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Ingram (1984) dan Laswad et.al. (2005) memiliki kesimpulan yang sama yaitu semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan sehingga kekayaan daerah meningkat dapat meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Berdasarkan Mussari dan Steccolini (2006) bahwa yang bukan merupakan pemerintah dengan kota-kota yang besar dianggap tidak mendapat tuntutan tinggi tentang pengungkapan informasi laporan keuangannya. Dengan demikian, penelitian ini berusaha membandingkan kualitas pengungkapan laporan keuangan daerah atau *Internet Financial Local Government Reporting* (IFLGR) antara dua kelompok sampel, yaitu Kabupaten dan Pemerintah kota dengan menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et. al. (2000), yaitu dengan

membandingkan empat komponen antara lain isi, ketepatan waktu, pemanfaatan teknologi dan *user support* (Verawaty, 2014).

Tabel 2.2 Indeks Aksesibilitas

Poin	Komponen	Keterangan	Variabel aksesibilitas	Keterangan
A	Isi/ <i>Content</i>	Komponen informasi keuangan seperti laporan neraca, rugi laba, arus kas, perubahan posisi keuangan serta laporan keberlanjutan perusahaan. Informasi keuangan yang	<i>Financial Highlights</i>	Menyajikan <i>summary financial statements</i> dalam bentuk tabel ringkas atau uraian ringkas dan mudah diakses
B		diungkapkan dalam bentuk html memiliki skor yang tinggi dibandingkan dalam format pdf, karena informasi dalam bentuk	<i>Financial Statement</i>	Menyajikan komponen Laporan Keuangan yang lengkap dan komprehensif
C		html lebih memudahkan penggunaan informasi untuk mengakses informasi keuangan tersebut menjadi lebih cepat.	<i>HyperText Markup Language (HTML) Format</i>	Bentuk HTML memiliki skor yang tinggi dibandingkan dalam format pdf karena informasi lebih mudah dan

				cepat diakses
D	Ketepatan waktu	ketika website perusahaan menyajikan informasi yang tepat waktu, maka semakin tinggi indeksnya.	Data tahun sebelumnya <i>(Data for Prior Years)</i>	IFLGR juga menyajikan laporan tahun sebelumnya sebagai pembanding
E			<i>Up Date</i>	IFLGR untuk tahun berjalan (misal disajikan persemester biar selalu update dan tepat waktu)
F	Pemanfaatan Teknologi	komponen ini terkait dengan pemanfaatan teknologi yang tidak dapat disediakan oleh media laporan cetak serta penggunaan media teknologi multimedia, <i>analysis tools</i> (contohnya Excel's Pivot Table), fitur-fitur lanjutan seperti implementasi Agen Cerdas ( <i>Intelligent Agent</i> ) atau <i>eXtensible Business</i>	<i>Analysis Tools</i>	Menyediakan <i>analysis tools</i> (contohnya, Excel Tabel Sumbu Putar ( <i>Excel's Pivot Table</i> )). <i>Pivot Table</i> yaitu salah satu fitur <i>Microsoft Excel</i> yang mampu menciptakan sebuah tabel interaktif yang dapat menampilkan

		<i>Reporting Language</i> (XBRL).		ringkasan data dalam jumlah besar.
G			Fitur Lanjutan	Menyediakan fitur-fitur lanjutan (seperti implementasi <i>Intelligent Agent</i> atau XBRL)
H	<i>User Support</i>	Indeks website perusahaan semakin tinggi jika perusahaan mengimplementasikan secara optimal semua sarana dalam website perusahaan seperti:	Mesin Pencari	Mesin pencari di dalam situs bisa digunakan untuk mencari laporan keuangan
I		media pencarian dan navigasi ( <i>search and navigation tools</i> ) (seperti FAQ, tautan ke halaman beranda, peta website, dan mesin pencari).	Halaman Tautan	Menyediakan tautan ke IFLGR di dalam situsnya
J			<i>Frequently Asked Question</i> (FAQ) dan Informasi Kontak	Menyediakan fasilitas tanya jawab atau email/ telepon pengelola

Sumber: *Style dan Tennyson, 2007*

Dari penjabaran tersebut maka hipotesa dalam penelitian ini yaitu:

H0: Ada perbedaan kualitas atas komponen isi/konten, ketepatan waktu, pemanfaatan teknologi dan *user support* yang mencolok jika dalam mengungkapkan

laporan keuangan maupun non keuangan melalui internet pada masing-masing website resmi Pemerintah kota dan Kabupaten.



## **BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009:14) dikatakan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode kuantitatif digunakan apabila masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktik, antara rencana dengan pelaksanaan. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini dilakukan generalisasi. Generalisasi merupakan pernyataan yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep yang berfungsi sebagai pembantu berpikir dan memahami, tidak sekedar mendeskripsikan data, tetapi juga memberikan struktur (Sjamsuddin, 1996:19). Ini berarti bahwa nantinya hasil yang diperoleh juga akan berlaku untuk semua populasi dalam penelitian.

### **3.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro, 2009). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi keuangan dan non keuangan yang terdapat dalam *website* masing-masing Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

### 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah semua pemerintah daerah dan kota di Jawa Timur. Peneliti memilih Jawa Timur sebagai objek penelitian dikarenakan Jawa Timur merupakan letak dari Universitas Jember dimana peneliti menempuh pendidikan perguruan tinggi serta memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Jawa Timur juga dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi. Alasan tersebut juga mengingat penelitian yang dilakukan oleh Ingram (1984) dan Laswad et al. (2005) yang memiliki kesimpulan yaitu semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan sehingga kekayaan daerah meningkat dapat meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Verawaty (2010) serta Verawaty dan Merina (2011) juga menemukan bahwa jumlah penduduk berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Adapun alasan peneliti memilih Jawa Timur sebagai objek penelitian dikarenakan Jawa Timur berada di peringkat 10 dari 12 Pemerintah Provinsi atas Keterbukaan Informasi Publik yang diumumkan Laporan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2014 oleh Komisi Informasi Pusat. Namun, juga ditemukan fakta bahwa Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai wilayah dengan angka kasus tindak pidana korupsi terbanyak selama semester kedua tahun 2013 yaitu mulai bulan Juli sampai Desember. Kasus korupsi di Jawa Timur merupakan peringkat pertama di Indonesia. Ini berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) (<http://sp.beritasatu.com/home/jawa-timur-terbanyak-lakukan-korupsi/48874>). ICW merupakan organisasi non pemerintah yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi di Indonesia (<http://www.antikorupsi.info/>). Penelitian ini dilakukan dikarenakan agar Jawa

Timur serta masyarakat didalamnya sebagai pemohon/pengguna hak keterbukaan informasi publik memiliki pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam mengelola informasi publik.

Penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dari penelitian ini dibagi menjadi dua. Kelompok pertama adalah semua Kabupaten di Jawa Timur. Adapun kelompok kedua adalah Pemerintah kota di Jawa Timur. Terdapat 38 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dengan rincian 29 Kabupaten dan 9 Kota.

Kriteria khusus tersebut adalah akan dipilih daerah mana yang merupakan daerah kategori paling luas, paling banyak penduduk, dan paling tinggi pendapatan per kapitanya. Hal ini berdasarkan penelitian Mussari dan Steccolini (2006) bahwa sampel yang bukan merupakan pemerintah dengan kota-kota yang besar dianggap tidak mendapat tuntutan tinggi tentang pengungkapan informasi laporan keuangannya. Selain itu kriteria umum untuk setiap kelompok sampel adalah memiliki *e-government* sampai dengan Desember 2014 dan *e-government* tersebut tidak dalam perbaikan (*maintenance*). Kriteria umum tentang kepemilikan *e-government* yaitu sampai dengan Desember 2014. Namun, dikarenakan mengingat salah satu prinsip laporan keuangan yaitu Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*) dimana periode satu tahun buku pada umumnya dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember maka laporan keuangan yang dilihat adalah laporan keuangan di tahun 2013 yang paling lambat disampaikan kepada publik maksimal 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi dengan media internet terhadap ketersediaan *Internet Financial Local Government Reporting* terhadap *website* seluruh Kabupaten dan Pemerintah kota di Jawa Timur. Selain itu, data sekunder lainnya adalah berbagai sumber yang

menjadi tinjauan pustaka untuk menghasilkan hipotesis sekaligus mengujinya, melalui artikel-artikel ilmiah, buku-buku, serta internet.

### 3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan pada *hypothetic-deductive methode* yaitu cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan. Menurut Sekaran (2006), penelitian dengan menggunakan metode ini melibatkan tujuh tahap, yaitu:

1. Observasi atau pengamatan (*Observation*). Menurut Riduwan (2011), observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara langsung ke objek penelitiannya untuk melihat kegiatan yang dilakukannya.
2. Pengumpulan Data Awal (*Preliminary Information Gathering*). Data merupakan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang dikumpulkan dari suatu populasi atau bagian populasi yang akan digunakan untuk menerangkan ciri-ciri populasi atau bagian populasi yang bersangkutan (Lungan, 2006: 13). Menurut Hasan (2009: 16) data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa data merupakan fakta atau keterangan yang dikumpulkan dari suatu populasi untuk menjelaskan karakteristik populasi tersebut. Adapun tujuan pengumpulan data menurut Lungan (2006: 11) antara lain, memperbaiki atau menyederhanakan teori atau hipotesis yang ada, menciptakan teori atau hipotesis yang baru, mengetahui keadaan atau hipotesis yang ada, dan memecahkan masalah yang mencakup inter-relasi antara beberapa kasus (kelompok data).

3. Perumusan Teori (*Theory Formulation*), Teori menurut Kerlinger (1973) yaitu satu set konsep, definisi dan proposisi yang saling berhubungan secara sistematis, menyajikan sebuah gambaran tentang suatu fenomena dengan menjelaskan hubungan antar variabel, bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut. Dapat disimpulkan bahwa perumusan teori yaitu suatu identifikasi terhadap aspek-aspek sosial yang dianggap relevan bagi kegiatan-kegiatan ilmiah tertentu. Pada tahapan ini, peneliti mencoba merumuskan teori-teori mana yang akan dipakai dalam melakukan penelitian. Teori yang telah dirumuskan tersebut menjadi alat dalam mengkaji suatu fenomena yang akan diteliti. Oleh karena itu, tingkat relevansi teori yang dirumuskan dengan masalah yang akan diteliti menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu penelitian.
4. Perumusan Hipotesis (*Hypothesis*). Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2009). Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.
5. Pengumpulan Data Statistik Selanjutnya (*Further Scientific Data Collection*). Statistik memiliki arti cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data termasuk cara pengambilan kesimpulan dengan memperhitungkan unsur ketidakpastian (*uncertainty*) berdasarkan konsep probabilitas (*probability*), dimana konsep probabilitas memiliki arti suatu konsep yang dilakukan untuk mencari peluang dari suatu kejadian dengan melakukan pengumpulan data secara acak (*random*). Konsep ini dapat mengetahui pemahaman tentang peluang dan jenis-jenisnya. Pengumpulan data lanjutan diperlukan untuk menunjang dari hipotesis yang sudah disusun. Sebagai bahan pelengkap untuk meneruskan ke proses analisis data. Pada tahap ini adalah bagian melengkapi dari pengumpulan data awal.

6. Analisis Data (*Data Analysis*). Patton (1994) menegaskan, analisis data lebih merupakan kegiatan memonitor dan melaporkan hasil observasi melalui prosedur yang jujur dan selengkap mungkin. Hal ini dilakukan guna untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah. Data yang diperoleh sebelumnya ditambah dengan hipotesis yang telah dibangun.
7. Deduksi (*Deduction*). Memiliki arti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Dengan demikian, penalaran deduksi adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan logis tertentu ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com))

### 3.6 Operasionalisasi Variabel

Adapun empat komponen indeks aksesibilitas *Internet Financial Local Government Reporting* yang mengadopsi dari indeks kualitas *Internet Financial Reporting* yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000) dalam Almilia (2009). Sedangkan menurut Style dan Tennyson (2007) dalam penelitian Verawaty (2014) disebutkan, adapun untuk menilai keempat komponen yang terdiri dari beberapa variabel aksesibilitas tersebut yaitu total indeks adalah 10 poin. Komponen isi memiliki maksimal 3 poin (poin A sampai C), ketepatan waktu adalah maksimal 2 poin (poin D dan E), pemanfaatan teknologi 2 poin (poin F dan G) dan *user support* adalah 3 poin (poin H sampai poin J). Perincian terpapar di bawah ini:

Poin A. 1 poin jika *website* resmi pemerintah daerah atau kota muncul di halaman pertama pencarian Google atau Yahoo dengan mengetikkan nama kota atau daerah.

Poin B. +1 poin jika *website* menyediakan lebih dari satu berkas lengkap dengan dokumen dari laporan keuangan.

Poin C. +1 poin jika laporan keuangan berupa *HyperText Markup Language* (HTML).

Poin D. +1 poin jika *website* resmi menyediakan informasi keuangan tahun sebelumnya.

Poin E. +1 jika *website* tidak sampai memperkenalkan kita mengklik lebih dari tiga kali klik untuk sampai pada laporan sebelumnya sebagai pembanding. Ini menandakan bahwa pengunjung *website* dipermudah untuk mengakses.

Poin F. +1 poin jika *website* resmi menyediakan informasi untuk mendapatkan atau mengakses salinan dari laporan keuangan pemerintah kota atau kabupaten.

Poin G. +1 poin jika berkas individu yang menyediakan laporan cetak ukurannya kurang dari 3MB.

Poin H. +1 poin jika mempunyai mesin pencari untuk menemukan konten yang dibutuhkan ataupun laporan keuangan pemerintah daerah.

Poin I. +1 poin jika *website* resmi pemerintah daerah atau kota memiliki *link* laporan keuangan pada beranda situs.

Poin J. +1 poin jika *website* resmi menyediakan detail kontak yang bisa dihubungi baik itu alamat, nomor telepon dan ataupun alamat email.

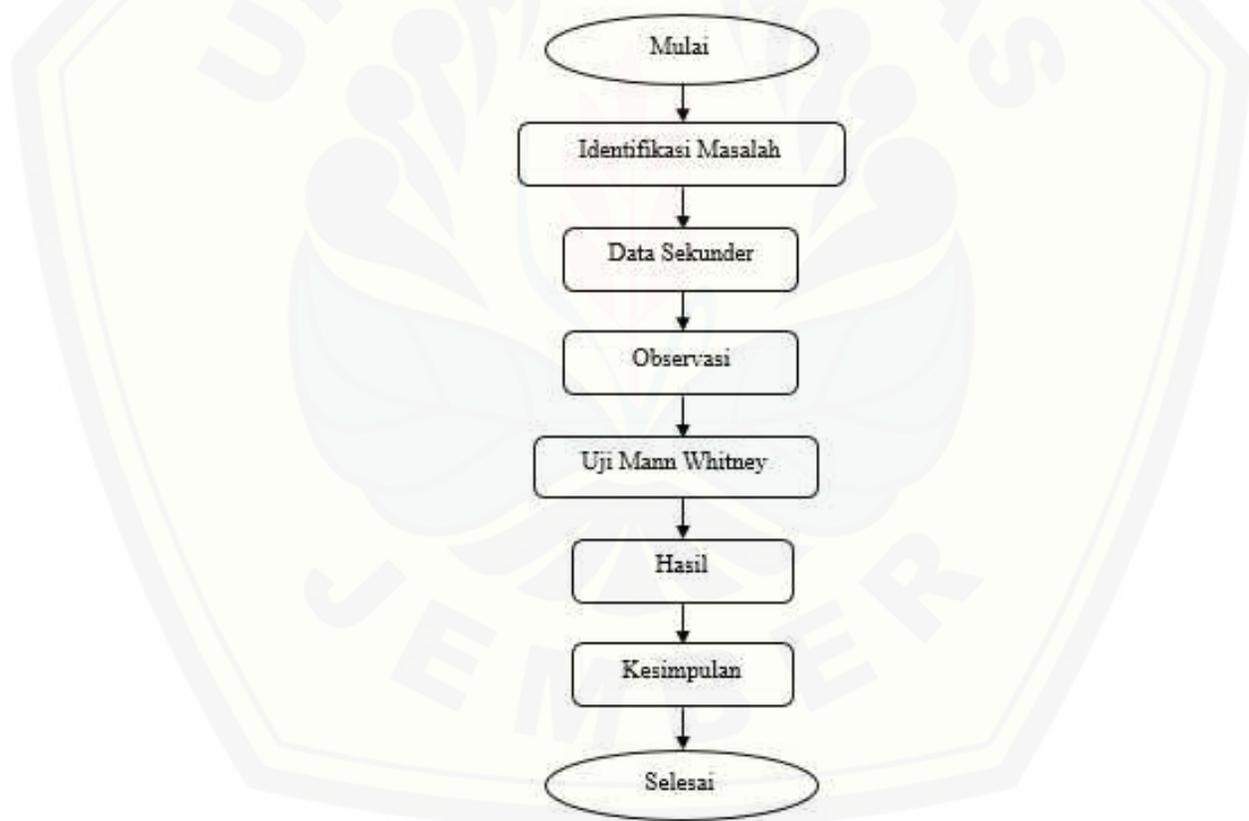
### 3.7 Uji Hipotesis

Menurut penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Verawaty (2014), penelitian seperti ini menggunakan pengujian statistik *Mann Whitney Test* untuk membandingkan komponen Isi/Konten, Ketepatan Waktu, Pemanfaatan Teknologi, dan *User Support* antara Pemerintah kota dan Kabupaten setelah dilakukan observasi pada setiap *website* resmi pemerintah kota maupun Kabupaten berdasarkan poin variabel indeks aksesibilitas. Setelah didapatkan hasil pada observasi ini maka dilakukan pengujian statistik *Mann Whitney Test* untuk membandingkan komponen Isi/Konten, Ketepatan Waktu, Pemanfaatan Teknologi dan *User Support* antara kedua kelompok sampel yaitu Pemerintah kota dan Kabupaten. Uji Mann Whitney adalah uji data non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan

respon dari dua kelompok data yang saling independen yaitu dalam penelitian ini Kabupaten dan Kota. Uji data non-parametrik sendiri pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Uji data non-parametrik adalah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi.

### 3.8 Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, tahapan kerja yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian